



PROVINSI BENGKULU

**RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020-2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Program Kerja BNNP Bengkulu Tahun 2020-2024.

Program kerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 menggambarkan Rencana Program Kerja BNN Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Provinsi Bengkulu selama lima tahun, untuk mewujudkan Perencanaan dengan menganalisa kerangka berpikir yang objektif dalam skenario pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyusunan rencana strategis kementerian dan lembaga tahun 2020-2024.

Secara umum BNN Provinsi Bengkulu berupaya keras untuk melakukan program pencegahan, rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang Rencana Kerja BNN Provinsi Bengkulu selama lima tahun sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Demikian rencana program kerja BNN Provinsi Bengkulu ini disampaikan. Semoga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada periode 2020-2024.

Kepala BNN Provinsi Bengkulu



Supratman, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan penjabaran terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategis serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 2020-2024.

Didalam Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional, terdapat Sistematisa Rencana Program Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

A. KONDISI UMUM

Menyajikan data terkait permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi. Jenis data yang dapat disajikan diantaranya;

a. Data fasilitas layanan rehabilitasi (LRIP dan LRKM)

Adapun Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah diantaranya :

1. Klinik Pratama BNNP Bengkulu
2. Klinik Pratama BNN Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu
4. Rumah Rehabilitasi BNNP Bengkulu

Adapun Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat diantaranya :

1. Pesona di Kota Bengkulu
2. Kipas di Kota Bengkulu
3. Dwin Foundation di Kabupaten Rejang Lebong
4. Yayasan Karunia Insani di kabupaten Rejang Lebong

b. Data fasilitas IPWL

IPWL merupakan instansi penerima wajib lapor sesuai dengan permenkes.

Adapun IPWL yang tidak aktif diantaranya :

1. Puskesmas Penurunan

2. Puskesmas Anggut Atas
3. Puskesmas Pasar Ikan
4. Puskesmas Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
5. RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong
6. RS Bhayangkara

Sedangkan IPWL yang aktif diantaranya :

1. RSKJ Soeprpto Bengkulu
2. Puskesmas Kampung Bali
3. Puskesmas Padang Serai

c. Data dan informasi kondisi demografi wilayah Bengkulu

Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera yang terletak berbatasan dengan Utara : Sumatera Barat, Selatan : Lampung, Barat : Samudra Hindia dan Timur : Jambi dan Sumatera Selatan. Luas wilayahnya 19.813 km² yang terdiri dari 1 kota dan 9 kabupaten diantaranya :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko-Muko
10. Kabupaten Seluma

Dari 1 kota dan 9 kabupaten tersebut baru 2 terbentuk BNNK yaitu BNNKota Bengkulu dan BNN Kabupaten Bengkulu Selatan.

d. Data SDM BNN di wilayah Provinsi Bengkulu

Adapun data pegawai BNN di wilayah Bengkulu meliputi :

- Data SDM/ Pegawai BNNP Bengkulu terdiri dari :
 - ASN : 30 Orang
 - Polri : 17 Orang
 - PPNPN : 31 Orang

- Data SDM/Pegawai BNN Kota Bengkulu terdiri dari :
 - ASN : 17 Orang
 - Polri : 2 Orang
 - PPNPN : 14 Orang
- Data SDM/Pegawai BNN Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :
 - ASN : 12 Orang
 - Polri : 1 Orang
 - PPNPN : 14 Orang

e. Data sarana prasarana perkantoran

Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu terletak di Jalan Batang Hari No. 110 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Gedung yang ditempati BNNP Bengkulu sudah milik BNNP Bengkulu sejak tahun 2015. Dengan luas bangunan 416 m² dan luas tanah 2735 m².

f. Senjata api

Dukungan pengamanan petugas di BNNP Bengkulu, BNN Kabupaten Bengkulu Selatan dan BNN Kota Bengkulu dilengkapi dengan:

- Pistol CZ P-07 : 21 Unit
- Senapan Shotgun 12GA : 5 Unit
- Senapan Scorpion : 5 Unit

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Bengkulu yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, struktur dan budaya organisasi.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program P4GN
- c. Membangun kerjasama yang lebih baik dengan instansi terkait melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2020

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN provinsi Bengkulu, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Bengkulu. adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Berdasarkan hasil survey BNN dan LIPI tahun 2019, angka prevalensi pemakai narkoba di provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 1,3% atau setara dengan 19.698 penduduk di provinsi Bengkulu. Jumlah pemakai 1 tahun terakhir adalah 0,90% atau setara dengan 13.789 penduduk di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, berdasarkan survey pada tahun 2019, diperkirakan ada 17.728 orang pecandu yang ada di seluruh wilayah perkotaan provinsi Bengkulu, dan diperkirakan terdapat 5.760 pecandu yang berdomisili di kota Bengkulu.
- b. Stigma bahwa penyalahguna adalah tindak kriminal menyebabkan para penyalahguna maupun keluarga tidak berani mengakses layanan rehabilitasi karena takut akan dipidana.
- c. Belum optimalnya penerapan Inpres 2 Tahun 2020 dimana masih menganggap masalah narkoba merupakan tugas BNN bukan tugas bersama sehingga belum ada regulasi yang bersifat mengikat.
- d. Sumber daya manusia yang ada di BNNP dan BNNK di wilayah Bengkulu yang masih sangat kurang.
- e. Petugas yang telah mendapatkan pelatihan sebagai asesor dipindahtugaskan ketempat lain sehingga menghambat proses layanan rehabilitasi.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana BNN Provinsi Bengkulu dalam mendukung Program P4GN.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Bengkulu merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Bengkulu juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemberantasan kejahatan narkoba di daerah
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam program P4GN
4. Peningkatan kualitas penguatan lembaga rehabilitasi

Arah kebijakan (1) antara lain meliputi : meningkatnya kemampuan personil dalam mengendalikan peredaran narkoba di daerah yang dirumuskan dengan menambah personil di bidang pemberantasan, meningkatkan dalam bidang pemetaan serta meningkatkan kerjasama dengan penegak hukum lainnya dengan melakukan koordinasi yang terintegrasi.

Arah kebijakan (2) antara lain meliputi : memperkuat hubungan kemitraan kelembagaan, memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lainnya di daerah dalam memecahkan permasalahan narkoba dengan harapan mampu melahirkan dampak positif bagi masyarakat.

Arah kebijakan (3) antara lain meliputi : peningkatan metode pencegahan melalui diseminasi informasi baik melalui media cetak, elektronik dan media sosial, serta menyediakan saluran laporan penyalahgunaan narkoba (Call Centre). Meningkatkan kegiatan calling di masyarakat, serta mengembangkan pendidikan anti narkoba baik lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam pencegahan narkoba.

Arah kebijakan (4) antara lain meliputi : meningkatkan perlindungan dan penyelamatan terhadap penyalahguna, pecandu/korban penyalahguna narkoba melalui program rehabilitasi, dengan cakupan peningkatan SDM tenaga rehabilitasi, peningkatan kualitas layanan dibidang rehabilitasi, serta melakukan monitoring terhadap klien rehabilitasi berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Bengkulu menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 sebesar Rp 10.450.000.000, yang tersebar di 2 unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Bengkulu secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	3,3	3,3	3,3	3,3
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	13 Orang	13 Orang	15 Orang	15 Orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang	-	8 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			tersertifikasi kompetensi teknis					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,2	3,2	3,2	3,2

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	-	-	-	1
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	15 Berkas	20 Berkas	20 Berkas	20 Berkas	25 Berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan	100	100	100	100	100

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			barang bukti narkotika dan non narkotika					
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	-	93	93	94	95
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	94	94	95
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi	-	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dengan Nilai IKPA mencapai target					

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	439.310.000	439.310.000	460.000.000	510.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	172.530.000	172.530.000	189.783.000	208.761.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi	-	712.220.000	712.220.000	712.220.000	712.220.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		P4GN	berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi					
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	106.000.000	106.000.000	116.600.000	244.860.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	233.164.000	233.164.000	233.164.000	233.164.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	194.128.000	194.128.000	194.128.000	194.128.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	1.154.887.000	1.154.887.000	1.154.887.000	1.154.887.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	31.540.000	31.540.000	31.540.000	31.540.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	57.530.000	57.530.000	57.530.000	57.530.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	100.000.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	1.013.437.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan	Meningkatnya	Nilai tingkat	-	125.520.000	125.520.000	138.072.000	151.879.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Tahanan dan Barang Bukti	pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan					
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	105.100.000	105.100.000	105.100.000	105.100.000
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	-	64.029.000	70.000.000	77.000.000	84.700.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	28.846.000	28.846.000	31.730.000	31.730.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	3.669.401.000	3.669.401.000	4.036.340.000	4.036.340.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	175.244.000	175.244.000	192.764.000	192.764.000

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*